



ORTI BALI

Media Komunikasi BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



Edisi XVI Februari - April 2013

SALAM REDAKSI

Om Swastyastu

Sejumlah kegiatan mewarnai hari-hari di Kantor Perwakilan Provinsi Bali baik yang bersifat rutin sampai dengan acara bertaraf internasional. Berbagai kegiatan ini bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan juga sebagai ajang sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut berbagai kegiatan berupa workshop ataupun *group discussion* dilakukan dengan melibatkan badan pemeriksa dari negara lain dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik dan meningkatkan kualitas BPK sebagai badan pemeriksa yang kredibel, independen, berintegritas dan profesional.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Redaksi

Daftar Isi

RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN DAN PENYELESAIAN TEMUAN BPK RI TERKAIT DPRD.....Hal 2

MEDIA VISIT ANGGOTA BPK RI KE BALI POST : ATENSI KHUSUS PADA TAMAN HUTAN RAYA..Hal 2

WORKING GROUP ON FIGHT AGAINST CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING.....Hal 3

WORKSHOP IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SE-PROVINSI BALI.....Hal 3

BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN MANDIRI ATAS INTEGRITAS (IntoSAINT) BPK TA 2013....Hal 4

KUNJUNGAN SISWA-SISWI SMK NEGERI 1 KENDAL.....Hal 4

KNOWLEDGE TRANSFER FORUMTEKNIK WAWANCARA INVESTIGASI.....Hal 5

DIKLAT TEKNIK WAWANCARA DAN SIAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....Hal 5

KUNJUNGAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.....Hal 6

Garuda Wisnu Kencana.....Hal 6

GALERI FOTO.....Hal 7

UCAPAN SELAMAT.....Hal 8

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS RENCANA KERJA PERWAKILAN BPK TAHUN 2013



Kuta, Maret 2013

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi, BPK RI mengadakan workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Satuan Kerja BPK Perwakilan yang dihadiri oleh Asesor PMPRB, seorang pendamping dan seorang Inputer dari setiap Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia. Workshop yang dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI (Drs. Hasan Bisri, MM.) ini diselenggarakan di Hotel Ramada Bintang Bali Resort, Kuta, Bali. Workshop dilaksanakan pada Selasa – Rabu, 5 – 6 Maret 2013 kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Semester I Tahun 2013 yang diselenggarakan bersama oleh Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) dan AKN VI BPK RI. Rakornis yang digelar pada Kamis – Jumat, 7 – 8 Maret 2013 ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan, para Kepala Sub Auditorat, para Ketua Tim Pemeriksaan LKPD, para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan (Kasubbag Setlan) dan para Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas dari 33 Perwakilan BPK RI se-Indonesia.

Dalam workshop PMPRB, peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk kemudian melakukan validasi atas pengisian sesuai kriteria penilaian dan model *scoring* di BPK. Keesokan harinya dilakukan pembahasan kesepakatan penilaian dan rencana aksi pengumpulan bukti. Dalam workshop tersebut juga dibahas pencapaian masing-masing Kantor Perwakilan dimana setiap Kantor Perwakilan diharapkan agar mampu mencapai *output* di setiap kegiatan. Sementara pada Rakornis yang juga dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI dan dihadiri oleh Anggota V BPK RI (Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.) serta Anggota VI BPK RI (DR. H. Rizal Djalil) dilakukan pembahasan mengenai strategi percepatan implementasi e-audit dalam pemeriksaan LKPD, hasil reuiv Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu, rencana pemeriksaan pajak hotel dan restoran, rencana pemeriksaan BUMD, rumusan opini, materialitas dan sampling, penyempurnaan buku panduan pemeriksaan LKPD, pembahasan aspek hukum terkait pemeriksaan, pemaparan tentang membangun kompetensi SDM Perwakilan melalui diklat berbasis kompetensi, dan diskusi panel penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam kerangka IHPS. Pada hari terakhir, Anggota V dan Anggota VI memberi pengarahan terkait dengan pemeriksaan atas LKPD.





Kuta, April 2013

BPK RI menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Temuan BPK RI Terkait DPRD pada Kamis, 11 April 2013 di Westin Hotel & Resort, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, BTDC Lot N-3, Nusa Dua, Kuta, Kabupaten Badung. Dalam Rapat Koordinasi ini, berlaku sebagai narasumber pada sesi I adalah Wakil Ketua KPK (Adnan Pandu Praja, SH., Sp. N., LL.M.) dan Anggota VI BPK RI (Dr. H. Rizal Djalil) dengan moderator Effendi Gazali, Ph.D., MPS., ID. Pada sesi II, Anggota Komisi XI DPR RI (I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM.) dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFA.) berlaku sebagai narasumber dengan moderator Wanda Hamidah. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Ketua Panitia Anggaran dan Sekretaris Dewan dari sekitar 245 DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-wilayah Timur Indonesia.

Pada sesi I, Wakil Ketua KPK menyampaikan materi berjudul "Pencegahan Terjadinya Kerugian Negara Akibat Korupsi" yang antara lain memaparkan mengenai Pengertian Sehat vs Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2013, Statistik Kasus Korupsi yang Sukses Ditangani oleh KPK 2004-2013, Hasil Audit Operasional BPKP Tahun 2012 Terhadap 33 Provinsi/Kabupaten/Kota,

Competencies of Integrity dan Indikator Spiritualitas. Sementara itu, Anggota VI BPK RI membawakan materi berjudul "Membedah Keuangan DPRD" yang antara lain membahas mengenai Tugas, Fungsi dan Peran Anggota DPRD, Temuan BPK Terkait Belanja Operasional DPRD (Perjalanan Dinas, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif, Belanja Tunjangan Kesehatan, Belanja Tunjangan Perumahan, Biaya Reses, Belanja Sosial) serta Isu-isu strategis lainnya.

Pada sesi II, dalam pemaparannya Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan pemaparan berjudul "Lesson Learnt : Implementasi Anggaran Belanja Operasional DPRD/D" yang antara lain menjabarkan mengenai Permasalahan Mengenai Perjalanan Dinas dan Suggested Solutions, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Suggested Solutions, Belanja Kegiatan Reses dan Suggested Solutions, Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif dan Suggested Solutions, Belanja Tunjangan Kesehatan dan Suggested Solutions serta Belanja Tunjangan Perumahan dan Suggested Solutions. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi membawakan presentasi berjudul "Upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Terutama Upaya Pengembalian Uang Negara dan Pencegahan Kerugian Negara" yang membahas mengenai Bantuan Sosial (Pengertian, Tujuan, Alur Pemberian, Monitoring dan Evaluasi, Data Penyimpangan dalam Penyaluran Bansos, Faktor Penyebab Penyimpangan dan Penganggulan atas Penyimpangan Dana Bantuan Sosial). Dalam setiap sesi, setelah selesai pemaparan materi oleh narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator.

MEDIA VISIT ANGGOTA BPK RI KE BALI POST : ATENSI KHUSUS PADA TAMAN HUTAN RAYA



Denpasar, Februari 2013

Anggota BPK RI (Drs. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum) didampingi Kepala Perwakilan Provinsi Bali (Efdinal, SE., MM.) dan para pejabat pelaksana BPK RI lainnya melakukan media visit ke Bali Post pada Sabtu, 23 Februari 2013 lalu. Rombongan BPK RI diterima oleh Pemimpin Umum Harian Bali Post (ABG Satria Naradha) beserta jajaran dan para jurnalis Bali Post Grup di kantor Harian Umum Bali Post.

Anggota BPK RI yang juga Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan BPK sedunia atau SAI (Supreme Audit Institution) mengatakan bahwa BPK siap mengaudit pengelolaan hutan mangrove di Bali. Tujuannya untuk melihat apakah ada penyimpangan atau penyalahgunaan izin. "Untuk kasus Taman Hutan Raya (Tahura) di Bali, pilihan BPK apakah pemeriksaan kinerja atas pengelolaan hutan mangrove di Bali. Kalau ada unsur kerugian Negara, maka BPK akan melakukan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu," imbuh Anggota BPK. Sebagai tahap awal, BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan atas faktadan dokumen yang menyangkut keluarnya pemanfaatan hutan mangrove untuk kepentingan pariwisata.

Anggota BPK RI menegaskan hutan mangrove harus dilindungi karena mempunyai tiga fungsi. Pertama, fungsi penyangga atas filter hubungan laut dan daratan. Kedua, sebagai ekosistem bagi flora dan fauna di kawasan tersebut. Ketiga, hutan mangrove terkait pariwisata yang artinya berhubungan dengan nilai ekonomis. "Kalau Bali mengusung mangrove dalam hal pariwisata tetapi dalam pengelolaannya tidak memadukan tiga fungsi itu, bisa dikatakan langkah dan kebijakannya tidak tepat. Karenanya perlu dilakukan pemeriksaan," ucap Anggota BPK.





Kuta, Februari 2013

BPK RI menjadi tuan rumah *Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML)* atau Pertemuan Kelompok Kerja Organisasi Badan Pemeriksa Sedunia Bidang Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang yang diselenggarakan di Santika Premier Beach Resort Hotel, Kuta, Bali pada 18 – 20 Februari 2013. Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI (Drs. Hasan Bisri, MM.) dan dihadiri oleh Anggota II BPK RI (Taufiequrrachman Ruki, SH.),

para pejabat Eselon I BPK RI, pejabat dari Aparat Penegak Hukum dan pejabat Pemerintah Provinsi Bali.

Pertemuan ini diikuti oleh 10 badan pemeriksa negara-negara anggota organisasi badan pemeriksa sedunia atau *International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)* yaitu Austria, Indonesia, Irak, Jerman, Malaysia, Meksiko, Mesir, Namibia, Polandia dan Rusia, serta merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan ke enam INTOSAI WGFACML pada tahun lalu di Sopot, Polandia. WGFACML merupakan sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh INTOSAI dengan tujuan untuk meningkatkan peran dan kerjasama dari badan pemeriksa sedunia atas pemberantasan korupsi dan pencucian uang internasional dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip dari praktik pengelolaan yang terbaik yang dapat dijadikan sebagai panduan pada saat pemeriksaan. Pertemuan berkonsep diskusi ini ditutup dengan acara *social program* ke Pasar Seni Sukawati di Gianyar, makan siang di Bebek Tepi Sawah Ubud, kunjungan ke *Monkey Forest* serta Museum Antonio Blanco dan kunjungan ke Garuda Wisnu Kencana (GWK) untuk menyaksikan Tari Kecak.

WORKSHOP IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SE-PROVINSI BALI

Kuta, Februari 2013

BPK RI menggelar Workshop Implementasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan se-Provinsi Bali pada Senin, 11 Februari 2013 dan mengambil tempat di Kharisma Ballroom, Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Kabupaten Badung. Workshop dengan narasumber Anggota VI BPK RI (DR. H. Rizal Djalil) ini dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Bali yang juga mengikutsertakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga beserta Kepala Sekolah SLTPN dan SMUN, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kadis PKAD/Kabag Keuangan. Selain Anggota VI BPK RI yang membawakan materi berjudul "Sudut Pandang BPK Terhadap Masalah Anggaran Pendidikan dan Kesehatan", tampak hadir sebagai pembicara adalah Anggota Komisi XI DPR RI (I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM.) yang membawakan materi berjudul "Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Untuk Mencapai *Millenium Development Goals (MDGs)* dan *Human Development Index (HDI)*", dan Deputi Kepala Bidang Investigasi BPKP (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA.) dengan materi "Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK."

Workshop ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah serta menggugah Bupati/Walikota se-Provinsi Bali untuk lebih meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara demi tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya, peningkatan kualitas terhadap pengelolaan keuangan negara ini bertujuan untuk mewujudkan keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam pemaparannya, Anggota BPK RI antara lain menjabarkan mengenai temuan hasil pemeriksaan BPK di bidang pendidikan dan kesehatan, permasalahan yang ditemukan terkait Jamkesmas dan Jamkesda, HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bali terkait angka melek huruf, proporsi murid lulus Sekolah Dasar, angka kematian bayi dan balita, angka kematian ibu, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Anggota Komisi XI DPR RI antara lain membahas mengenai *The 8 goals Millennium Development Goals (MDGs)*, Hubungan MDGs dengan IPM atau HDI, Latar Belakang MDGs dan Target Pencapaian MDGs tahun 2015 serta Renstra Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2014 Dalam Rangka Mencapai MDGs. Sedangkan Deputi Kepala Bidang Investigasi BPKP memaparkan mengenai keuangan negara, pengertian korupsi dan upaya pemberantasan korupsi, kerugian keuangan negara serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selesai pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Anggota BPK RI.



Denpasar, April 2013

Dalam rangka mengedepankan kesadaran atas Integritas dan pencegahan dari pelanggaran Integritas, Inspektorat Utama BPK RI mengadakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri atas Integritas (IntoSAINT) BPK TA 2013 pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Bimbingan Teknis yang dibuka oleh Kepala Perwakilan (Efdinal, SE., MM.) ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 April 2013 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Perwakilan Provinsi Bali. Berlaku sebagai pembicara adalah Najmatuzahra dan Imammudin Achmad, sedangkan sebagai moderator adalah Intan Rahayu W. dan Tedy Artawan. Acara ini diikuti oleh 25 orang pegawai dari setiap unit kerja di Perwakilan Provinsi Bali yaitu Sub Bagian SDM, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan, Sub Bagian Umum, Sub Bagian Hukum dan Humas, Sub Auditorat Bali I dan Bali II.

Penilaian Mandiri atas Integritas atau *Self Assessment Integrity* merupakan alat yang dikembangkan bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri Belanda dan Pemerintah Kota Amsterdam. Pengembangan IntoSAINT di BPK terutama integritas sektor publik mengusung tema *BPK Leading by Example* yang bertujuan untuk memperkuat peran BPK sebagai pengawas integritas pada sektor publik; pertukaran pengalaman di antara BPK negara lain tentang faktor-faktor integritas. Sedangkan dampak yang diinginkan adalah berbaginya pandangan dalam komunitas INTOSAI

mengenai permasalahan integritas yang terjadi di BPK lain dan kemungkinan solusinya. Bimbingan Teknis dilakukan oleh pegawai dengan cara pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang risiko dan pengendalian melalui konsep diskusi berkelompok yang mencakup kerentanan proses, tingkat kematangan Sistem Pengendalian Integritas dan rekomendasi untuk tindak lanjut.



KUNJUNGAN SISWA-SISWI SMK NEGERI I KENDAL

Denpasar, Februari 2013

Empat orang pendamping dan 150 siswa-siswi SMK Negeri 1 Kendal bertamu ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Selasa, 5 Februari 2013. Zainal Abidin, SE., MM. (Kepala Sub Bagian Umum selaku Plh. Kepala Perwakilan) menerima rombongan yang bertandang dalam rangka Kunjungan Industri ini di auditorium kantor perwakilan.

Setelah sambutan dari Plh. Kepala Perwakilan, giliran ketua rombongan (Ngudiana Putra) menyampaikan tujuan dan maksud kunjungan. Selanjutnya, Ketua Tim Junior dari Sub Auditorat Bali I (I Putu Karang Riyasa, SE., Ak.) memberikan pemaparan mengenai BPK RI dan profil BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang antara lain menjelaskan tentang Landasan Hukum BPK RI (Konstitusional dan Operasional), Kedudukan BPK Berdasarkan UUD 45 (sebelum dan sesudah amandemen), Tugas BPK, Wewenang BPK, Visi dan Misi BPK, Struktur Organisasi BPK (Keanggotaan BPK RI dan Lingkup Tugasnya), Sejarah Terbentuknya Perwakilan Provinsi Bali, Struktur Organisasi dan Entitas Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Bali, Jenis dan Siklus Pemeriksaan, Unsur Kesekretariatan (Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Sarana dan Prasarana) serta Kegiatan Perwakilan Provinsi Bali.



Para siswa tampak antusias melontarkan pertanyaan pada sesi tanya jawab. "Dalam melakukan pemeriksaan, auditor pasti menghadapi kendala. Strategi apa yang dilakukan auditor dalam mengatasi kendala tersebut?" tanya Alifatul Dewi, salah seorang siswa. Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Tim Junior menjelaskan bahwa memang benar dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa menghadapi kendala-kendala. Karena itu, BPK membekali semua pemeriksa dengan diklat. Selain sebagai bekal dalam menghadapi berbagai masalah, diklat juga diberikan dengan tujuan mencapai profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan.

"Kendala yang dihadapi bisa berupa intervensi karena adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan entitas. Karena itu, seorang auditor harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan dimana pendekatan ini BPK berikan berupa berbagai macam diklat. Auditor tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang laporan keuangan tetapi juga pengetahuan lain yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan," imbuh Plh. Kepala Perwakilan. Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama.

Denpasar, Maret 2013

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia khususnya di bidang teknik wawancara, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan *Knowledge Transfer Forum (KTF) Teknik Wawancara Investigasi* pada Rabu, 20 Maret 2013. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Sub Auditorat Bali II (Drs. Yohannes Manuputty) ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Perwakilan dan diikuti oleh sekitar 35 orang yang terdiri dari para Ketua Tim Senior dan pemeriksa di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali.

Berlaku sebagai narasumber adalah I Gusti Agung Kurniawan dan Topan Sani dari Unit Investigasi BPK RI Pusat di Jakarta. Narasumber memaparkan pengalaman-pengalaman dan contoh-contoh riil dalam melakukan wawancara dengan komunikasi sehingga terjadi interaksi yang baik antar kedua belah pihak. Kegiatan dilaksanakan dengan konsep *sharing* pengalaman, diskusi serta tanya jawab. Para peserta tampak antusias menyimak penjelasan dari kedua narasumber sejak awal hingga akhir berlangsungnya kegiatan.



DIKLAT TEKNIK WAWANCARA DAN SIAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Denpasar, Februari 2013

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia khususnya yang berhubungan dengan bidang pemeriksaan, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali mengadakan diklat teknik wawancara dan SIAP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diklat yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 8 Februari 2013 ini diikuti oleh 40 orang auditor di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali. Dibuka oleh Zainal Abidin, SE., MM. (Kepala Sub Bagian Umum selaku Plh. Kepala Perwakilan), diklat teknis ini digelar di Ruang Rapat Lantai 3 kantor perwakilan.

Materi diklat tidak hanya bersifat teori ataupun pemaparan dari widyaiswara tetapi juga berupa praktek. Peserta diklat diminta menerapkan teknik wawancara yang bertujuan untuk menggali data dan informasi. Dalam praktek tersebut peserta diklat diminta untuk bermain peran dimana salah satu peserta diklat menjadi narasumber dan peserta lainnya menjadi pewawancara. Dengan pelatihan semacam ini diharapkan agar para auditor lebih *luwes* dan mahir dalam hal pengumpulan data saat tugas pemeriksaan di lapangan terutama pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan segera dilaksanakan. Diklat ditutup oleh Drs. Yohannes Manuputty, Kepala Sub Auditorat Bali II selaku Plh. Kepala Perwakilan saat itu.



Denpasar, Februari 2013

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali kedatangan tamu. Kali ini, tiga orang dosen pendamping dan sekitar 92 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal bertandang ke kantor perwakilan pada Rabu, 6 Februari 2013. Drs. Yohannes Manuputty (Kepala Sub Auditorat Bali II selaku Plh. Kepala Perwakilan) menerima rombongan yang bertandang dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini di auditorium kantor perwakilan.

Sebagai pembuka adalah sambutan dari Plh. Kepala Perwakilan. Setelah itu giliran Pembantu Dekan III (Toni Haryadi, SH., MH.) selaku ketua rombongan menyampaikan tujuan dan maksud kunjungan. Selanjutnya, Ketua Tim Junior dari Sub Auditorat Bali I (I Putu Karang Riyasa, SE., Ak.) memberikan pemaparan mengenai BPK RI secara umum (meliputi Landasan Hukum BPK RI secara Konstitusional dan Operasional, Kedudukan BPK Berdasarkan UUD 45 sebelum dan sesudah amendemen, Tugas BPK, Wewenang BPK, Visi dan Misi BPK, Struktur Organisasi BPK, Keanggotaan BPK RI dan Lingkup Tugasnya) dan profil BPK RI Perwakilan Provinsi Bali (Sejarah Terbentuknya Perwakilan, Struktur Organisasi dan Entitas Pemeriksaan Perwakilan, Jenis dan Siklus Pemeriksaan, Unsur Kesekretariatan yang meliputi Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Kegiatan Perwakilan Provinsi Bali).

Para mahasiswa tampak antusias melontarkan pertanyaan pada sesi tanya jawab. "Selain BPK, juga terdapat BPKP dan Inspektorat yang melakukan tugas pemeriksaan di Pemda. Apakah hal ini tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih?" tanya Kāsuri, salah seorang mahasiswa. Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Tim Junior menjelaskan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang sudah jelas disebutkan bahwa BPK-lah

yang melakukan pemeriksaan dimana dalam melakukan tugasnya, BPK bisa mendapatkan informasi dari Inspektorat berupa laporan hasil pengawasan Inspektorat yang disampaikan kepada BPK. Selain dari Inspektorat, informasi juga bisa didapat melalui pengaduan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Dari namanya saja sudah terlihat jelas perbedaan antara BPK, BPKP dan Inspektorat/Bawasda. BPKP dan Bawasda merupakan lembaga pengawas sedangkan BPK merupakan lembaga pemeriksa. BPKP dan Inspektorat melakukan pemeriksaan tahun berjalan (pre audit) sedangkan BPK memeriksa tahun anggaran yang sudah selesai (post audit)," imbuh Plh. Kepala Perwakilan. Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama.



Info Pariwisata

Garuda Wisnu Kencana

Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (*Garuda Wisnu Kencana Cultural Park*), disingkat GWK, adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Tanjung Nusa Dua, Kabupaten Badung, kira-kira 40 kilometer di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal taman budaya ini, direncanakan akan didirikan sebuah *landmark* atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang dalam agama Hindu adalah Dewa Pemelihara (Sthiti), yang sedang menunggangi Burung Garuda setinggi 12 meter. GWK ini merupakan mahakarya dari seniman Bali (I Nyoman Nuarta).

Area Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah atau 263 meter di atas permukaan laut. Patung ini nantinya setelah selesai akan menjadi patung terbesar dunia dengan tinggi 75 meter dan lebar 60 meter dan akan mengalahkan Patung Liberty.

Di kawasan itu terdapat juga sebuah lorong besar pilar berukir batu kapur yang mencakup lebih dari 4000 meter persegi luas ruang terbuka yaitu *Lotus Pond*. Dengan kapasitas ruangan yang mampu menampung hingga 7000 orang, *Lotus Pond* telah mendapatkan reputasi yang baik sebagai tempat sempurna untuk mengadakan acara besar dan internasional. Terdapat juga patung tangan Wisnu yang merupakan bagian dari patung Dewa Wisnu. Ini merupakan salah satu langkah lebih dekat untuk menyelesaikan patung Garuda Wisnu Kencana secara lengkap.





Kepala Sub Auditorat Bali II (Drs. Yohannes Manuputty), Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas (I G. A. Masningrat, SH.) dan Ketua Tim Yunior (I Putu Karang Riyasa, SE., Ak.) berfoto bersama dengan Pembantu Dekan III (Toni Haryadi, SH., MH.), dosen pendamping dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Workshop Implementasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan se-Provinsi Bali pada Senin, 11 Februari 2013 di Kharisma Ballroom, Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Kabupaten Badung dengan narasumber Anggota VI BPK RI (DR. H. Rizal Djalil), Anggota Komisi XI DPR RI (I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM.) dan Deputy Kepala Bidang Investigasi BPKP (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFA.)



Wakil Ketua BPK RI (Drs. Hasan Bisri, MM.) dan Anggota II BPK RI (Taufiequrrachman Ruki, SH.) berfoto bersama dengan peserta Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML) di Santika Premier Beach Resort Hotel, Kuta, Bali pada 18 – 20 Februari 2013



Wakil Ketua BPK RI (Drs. Hasan Bisri, MM.) saat membuka workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPK RI di Hotel Ramada Bintang Bali Resort, Kuta, Bali pada Selasa – Rabu, 5 – 6 Maret 2013



Anggota BPK RI (Drs. Ali Masykur Musa, M.Si, M. Hum) saat melakukan media visit diterima oleh Pemimpin Umum Harian Bali Post (ABG Satria Naradha) beserta jajaran dan para jurnalis Bali Post Grup



Anggota V BPK RI (Drs. Supto Amal Damandari, Ak.) memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Teknis Rencana Kerja Perwakilan BPK RI Tahun 2013 di Hotel Ramada Bintang Bali Resort, Kuta pada Kamis – Jumat, 7 – 8 Maret 2013



Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Temuan BPK RI Terkait DPRD pada Kamis, 11 April 2013 di Westin Hotel & Resort, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, BTDC Lot N-3, Nusa Dua, Kuta dengan narasumber Anggota VI BPK RI (DR. H. Rizal Djalil), Anggota Komisi XI DPR RI (I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM.), Deputy Kepala Bidang Investigasi BPKP (Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFA.) dan moderator Wanda Hamidah.



Kepala Sub Bagian Umum (Zainal Abidin, SE., MM.), Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas (I G. A. Masningrat, SH.) dan Ketua Tim Yunior (I Putu Karang Riyasa, SE., Ak.) berfoto bersama dengan Guru Pendamping dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kendal

**SELAMAT HARI RAYA PASKAH
2013**

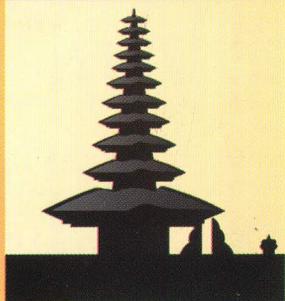


**GONG XI FA CHAI
SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2564**

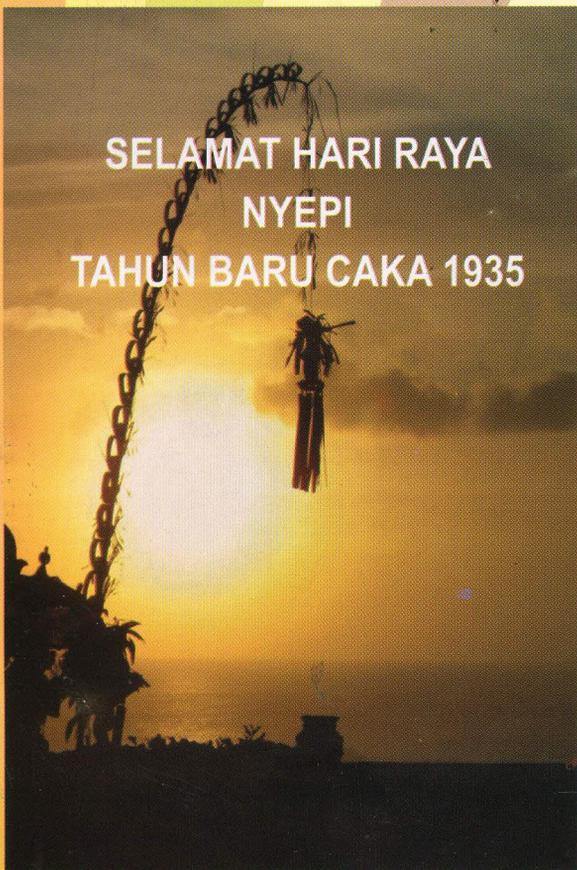


Segenap Pimpinan dan Staf BPK RI Perwakilan Provinsi Bali
Mengucapkan

**RAHAJENG NYANGRA
GALUNGAN
LAN
KUNINGAN
2013**



**SELAMAT HARI RAYA
NYEPI
TAHUN BARU CAKA 1935**



SELAMAT ATAS KELAHIRAN

IDA AYU GEDE PRADNYA SARASWATI



DENPASAR, 28 MARET 2013

Putri dari :

**DESAK MADE PRADNYANITA
(Staf Sub Bagian SDM)**

Dan

**I B. G. SATYA HRDAYA M.
(Staf Sub Auditorat Bali II)**

TIM REDAKSI

PENGARAH : EFDINAL

PENANGGUNG JAWAB : IDA BAGUS KETUT WISNU

KETUA : I G.A. MASNINGRAT

SEKRETARIS : NI NYOMAN AYU SUARTINI

ANGGOTA : BEVY KARTIKASARI , IKA SEVIANI PUJI LESTARI , I GUSTI AGUNG ISTRI AGUNG

I GUSTI AGUS AGUNG BRAHMARAWAN , ARDHINUR BESTARI

ALAMAT REDAKSI : JALAN D.I. PANJAITAN NO.2, RENON, DENPASAR 80000

TELEPON (0361) 229193, FAXIMILE (0361) 229184, 256205

E-MAIL : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com

WEBSITE : www.denpasar.bpk.go.id